

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Amerika Serikat atau United States of America adalah sebuah negara Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik Federal.<sup>1</sup> Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari empat puluh delapan negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik Ibu Kota Washington D.C.. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah Barat dan di Timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah Utara dan di Meksiko di sebelah Selatan. Amerika Serikat merupakan negara terluas ke-tiga atau ke-empat di dunia dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi (9,83 juta km). Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling multietnik dan paling multikultural di dunia. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia.

Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula pada abad ke-16. Estevanico yang berasal dari Azamor, Maroko merupakan Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah.<sup>2</sup> Dengan itu, dalam mempelajari kedatangan Muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19.

---

<sup>1</sup> CIA. *The World Factbook: United States*. Dikutip dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>, pada tanggal 30 September 2009.

<sup>2</sup> Queen, Edward L; Prothero, Stephen & Shattuck Jr, Gardiner H (1996). *The Encyclopedia of American Religious History*.

Estevanico adalah orang Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Estevanico datang ke Amerika sebagai seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16.<sup>3</sup> Selama tahun 1520-an telah didatangkan budak ke Amerika dari Afrika. Dari beberapa sumber, kedatangan paling awal imigran Muslim di Amerika Serikat adalah antara tahun 1875 dan 1912 dari kawasan Timur Tengah, yaitu Suriah, Yordania, Palestina dan Israel.<sup>4</sup>

Pada masa kepemimpinan Barack Obama, Obama menerapkan kebijakan yang melakukan pendekatan terhadap negara-negara Muslim, yaitu kebijakan *War on Terrorism* dan *Deffered Action for Childhood Arrivals*. Dalam kebijakan *War on Terrorism* pada era Obama, Obama melakukan pendekatan dengan negara-negara Muslim bertujuan untuk mengembalikan citra AS sebagai *guardian of diplomacy* yang memprioritaskan perdamaian dengan merangkul negara-negara Muslim dengan bekerjasama memerangi terorisme.<sup>5</sup> *Deffered Action for Childhood Arrivals* yang merupakan kebijakan imigrasi Amerika yang diluncurkan pada tahun 2012 yang lalu pada pemerintahan Obama mendorong tindakan tangguhan untuk anak muda yang tidak berdokumen yang telah datang ke AS sebagai anak-anak.<sup>6</sup> Dengan syarat hadir secara ilegal di AS sebelum ulang tahun ke 16, telah tinggal terus menerus di AS sejak 15 Juni 2007, dan

---

<sup>3</sup> Logan, Rayford (1940). *Phylon: "Estevanico, Negro Discoverer of the Southwest: A Critical Reexamination. Vol. 1, No. 4.*, hlm, 305-314.

<sup>4</sup> Smith, Jane I & Haddad, Yvonne Yazbeck (2015). *The Oxford Handbook of American Islam*. hlm. 14-16.

<sup>5</sup> <https://m.hizbut-tahrir.or.id/2008/12/01/barack-obama-harapan-semu/> diakses pada 29 November 2016.

<sup>6</sup> Gonzales R.G, Terriquez V, Rusczyk S (2014). *Becoming DACAmended Assessing the ShortTerm Benefits of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)*. (American Behavioral Scientist: SAGE Publications) hlm. 72.

berusia dibawah 31 tahun pada 15 Juni 2012 (lahir pada 16 Juni 1981 atau setelahnya).<sup>7</sup>

Semenjak maraknya Terorisme Radikal, Amerika Serikat merasa terancam dengan adanya Muslim di negara tersebut yaitu dengan ketakutan adanya terorisme. Dalam kampanye anti-Muslim yang dilakukan pada saat Presiden saat ini Donald Trump, Donald Trump mensistematisasi Islamophobia dalam kampanye, hal itu tidak pernah dilakukan oleh capres-capres sebelumnya.<sup>8</sup> Kampanye Donald Trump dinilai cenderung menebarkan kebencian terhadap Islam dan Muslim di tengah warga Amerika Serikat dan juga telah meningkatkan aksi anti-Muslim di Amerika Serikat.

Donald John Trump lahir pada 14 Juni 1946 lahir di New York City, New York. Trump adalah seorang pengusaha, politisi, tokoh televisi realitas dan juga Presiden Amerika Serikat ke-45. Pada tahun 1971, Trump memimpin Organisasi Trump, perusahaan induk utama untuk semua properti bisnis dan kepentingan bisnis lainnya. Dalam karir bisnisnya, Trump membangun gedung perkantoran, hotel, lapangan golf, fasilitas bermerek, dan bahkan gudang di seluruh dunia. Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dalam pemilihan presiden 2016. Donald Trump telah

---

<sup>7</sup> U.S. Citizenship and Immigration Services. *Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)*. Dikutip dari USCIS: <https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca>.

<sup>8</sup> REPUBLIKA. *Islamophobia di AS Meningkat Terkait Kampanye Donald Trump*. Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/11/05/og5cla368-islamophobia-di-as-meningkat-terkait-kampanye-donald-trump>, pada tanggal 5 November 2016.

mengubah kandidat presiden dari Partai Demokrat di Hillary Clinton. Donald Trump diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017. Donald Trump memperoleh gelar sarjana dari Wharton School of Economics di University of Pennsylvania pada tahun 1968. Pada tahun 1971, Donald Trump mengambil alih perusahaan konstruksi milik negara Fred Fred . Trump muncul di ajang Miss USA yang digantikan oleh Trump dari 1966 hingga 2015. Pada tahun 2000, Donald Trump berhasil mencalonkan diri sebagai Presiden Partai Reformasi, tetapi Donald Trump mengundurkan diri sebelum pemungutan suara dimulai.<sup>9</sup>

Trump mengumumkan pencalonannya sebagai presiden Republik dan menjadi kandidat presiden pada Juni 2015. Trump secara resmi mencalonkan diri sebagai presiden pada konferensi Nasional pada Mei 2016. Kampanye Trump menerima liputan luas di dalam negeri atau luar negeri, sesuai dengan topik yang dibahas, Twitter dan juga kegiatan kampanye yang menimbulkan kontroversi atau terbukti salah. Kegiatan kampanye sepanjang pemilihan pendahuluan adalah banyak protes dan demonstrasi oleh warga Amerika Serikat. Setelah Trump memenangkan pemilihan, Trump memulai proses transisi pemerintah. Trump adalah orang yang memiliki usia 70 tahun.<sup>10</sup>

Pada 20 Januari 2017, Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, banyak masyarakat Muslim/non Muslim protes akibat

---

<sup>9</sup> Forbes. *Donald Trump*. Dikutip dari <https://www.forbes.com/profile/donald-trump/?list=billionaires>.

<sup>10</sup> Kamisar, Ben (2016). "*Trump: Muslim ban 'morphed' into 'extreme vetting'*". Dikutip dari The Hill: <https://thehill.com/blogs/ballot-box/300132-trump-muslim-ban-morphed-into-extreme-vetting>, pada tanggal 10 September 2016

kebijakannya yang kontroversial itu yang dapat menimbulkan konflik. Bagaimanapun, <sup>11</sup>Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang kehadiran pengungsi yang berasal dari negara Muslim masuk di wilayah Amerika Serikat tersebut. Dengan kebijakannya, Trump percaya bahwa langkahnya itu demi masyarakat Amerika Serikat untuk mengamankan Amerika Serikat terhadap ancaman teroris Islam radikal. Pada 4 Februari 2017, <sup>12</sup>Amerika Serikat untuk sementara mencabut hampir 60.000 visa setelah negara-negara itu sepakat bahwa Muslim memasuki AS sesuai dengan permintaan perjanjian Trump. Visa pencabutan pemerintah mengosongkan visa perjalanan untuk orang-orang yang ingin memasuki AS, tetapi visa ini dapat dipulihkan tanpa harus meminta izin baru. Dalam 90 hari, aplikasi visa AS melakukan pemeriksaan ketat pada imigran Muslim.

Batas perintah eksekutif Trump bagi para pengungsi ke Amerika Serikat, bagi para pengungsi Suriah yang mengajukan tenggat waktu yang tidak ditentukan dan mereka yang ditagih untuk Iran, Irak, Libya, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman, dan semua pengungsi selama tiga bulan atau 120 hari sehingga negara-negara tersebut negara tersebut dilarang memasuki Amerika Serikat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> BBC News Indonesia. *Trump batasi jumlah pengungsi demi lindungi AS dari 'ancaman teroris Islam radikal'*. Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38780658> pada tanggal 28 Januari 2017.

<sup>12</sup> Detiknews. *Dampak Kebijakan Imigrasi Trump, AS Cabut 60 Ribu Visa*. Dikutip dari <https://news.detik.com/internasional/3413610/dampak-kebijakan-imigrasi-trump-as-cabut-60-ribu-visa>, pada tanggal 4 Februari 2017.

<sup>13</sup> BBC News Indonesia. *Kebijakan larangan Trump mulai dirasakan dampaknya*. Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40453147>, pada tanggal 30 Juni 2017.

Mulai berlaku pukul 8:00 malam, Kamis, 30 Juni, para pengunjung lainnya diberlakukan selama 120 hari ke depan. Warga yang menganggap Muslim memasuki wilayah AS, yaitu Irak, Iran, Somalia, Libya, Suriah, Sudan dan Yaman. Tujuh negara bagian yang memasuki AS hanya dibatasi hingga 90 hari sementara visanya valid. Dalam hal itu, Trump menyetujui penangguhan ini dan larangan untuk menghindari perlindungan dari AS, tetapi ada banyak yang menentang kebijakan perdagangan diskriminatif dan anti-Muslim Trump. Kebijakan Trump diumumkan pada Maret 2017 malam hari di Washington, orang-orang dari enam negara yang tidak memiliki hubungan keluarga dan bisnis di AS tidak dapat meminta visa. Sebelum kebijakan itu diterapkan, negara bagian Hawaii telah meminta klarifikasi dari pengadilan federal mengenai larangan tersebut. Negara bagian Hawaii adalah salah satu negara bagian AS yang menolak kebijakan Trump. Sementara Mahkamah Agung AS telah menerima bagian dari kebijakan imigrasi Trump, tidak semua aturan untuk larangan tersebut dapat diterapkan setelah keputusan Mahkamah Agung AS untuk mengganti larangan tersebut. Pengunjung atau imigran dari negara-negara yang dapat dihubungi oleh umat Islam dapat mengunjungi AS untuk pengunjung yang memiliki keluarga dekat, hubungan bisnis atau pendidikan dengan pihak terkait. Kebijakan imigran yang pertama kali dirilis pada 27 Januari 2017 telah memicu protes massal di sejumlah bandara di AS. Trump kemudian merevisi aturan tersebut pada 6 Maret 2017 walaupun tetap digugat oleh sejumlah negara bagian.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam permasalahan ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan, yaitu: *Mengapa Donald Trump membatasi imigran yang berasal dari 7 negara (Irak,*

Iran, Somalia, Libya, Suriah, Sudan dan Yaman) pada kebijakan imigran Amerika Serikat?

### C. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan aktor tersebut tentang *Kebijakan Donald Trump terhadap Imigran Muslim di Amerika Serikat* pada tahun 2015-2018, maka saya mencoba untuk menjelaskan masalah tersebut perlu diuraikan beberapa konsep dan teori, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Securitisation Theory atau Teori Sekuritisasi

Dalam Hubungan Internasional, Teori Sekuritisasi merupakan teori yang berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap studi keamanan kontemporer yang memperkaya studi keamanan, sehingga studi keamanan menjadi salah satu studi yang dinamis. Teori Sekuritisasi dan perkembangan studi sekuritisasi migrasi berawal di Eropa yang dihasilkan dari analisa terhadap pengalaman negara-negara Eropa. Teori Sekuritisasi dicetuskan oleh pemikir dari *Copenhagen School* seperti Ole Waever dan Barry Buzan. Menurut mereka, sekuritisasi diartikan sebagai “... *the move that takes ... beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics*”<sup>14</sup>. Berdiri dari konstruksi sosial terhadap keamanan, teori sekuritisasi telah berkembang secara luas sebagai konsekuensi logis atas melebarnya agenda keamanan dalam studi keamanan. Melebarnya agenda keamanan ini diperlihatkan dengan munculnya perdebatan mengenai

---

<sup>14</sup> Buzan, Barry (2006). “*The ‘War on Terrorism’ as the New ‘Macro-Securitization’?*” (Oslo: Oslo Workshop) hlm. 6.

*nature* dan arti dari ‘keamanan’ yang secara tradisional melingkupi keamanan negara dan keamanan militer, kini diperlukan perluasan agenda untuk mencakup aktor-aktor keamanan yang bervariasi dari individual dan *sub-state group* hingga perhatian global seperti lingkungan yang selama ini termarginalisasikan dalam konsepsi tradisional yang bersifat *state-centric*.

Menurut Copenhagen School, teori sekuritisasi tidak menempatkan ‘keamanan’ dalam kondisi objektif, namun, sebagai hasil dari proses sosial yang spesifik, yakni konstruksi sosial terhadap isu keamanan (*who or what is being secured, and from what*) yang dianalisis dengan memeriksa “*securitizing speech-acts*” yang mampu menjelaskan ancaman yang direpresentasikan atau dengan kata lain dengan mensekuritisasi isu<sup>15</sup> Sebagaimana yang dipaparkan oleh Waever, bahwa:

*What then is security? With the help of language theory, we can regard “security” as a speech act. In this usage, security is not of interest as a sign that refers to something more real; the utterance itself is the act. By saying it, something is done (as in betting, giving a promise, naming a ship). By uttering “security” a state-representative moves a particular development into a specific area, and thereby claims a special right to use whatever means are necessary to block it.”<sup>16</sup>*

---

<sup>15</sup> Aitken, Rob. “*Performing Capital: Toward a Cultural Economy of Popular and Global Finance*. hlm. 513.

<sup>16</sup> *Ibid*



Dari penjelasan tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat proses konstruksi dari pendekatan sekuritisasi, bahwa persepsi tentang keamanan serta keancaman tergantung secara signifikan pada bagaimana para aktor memahami dan membentuk ancaman tersebut daripada kondisi ancaman yang sebenarnya.

## **2. The Securitization of Immigration atau Sekuritisasi Migrasi**

Sekuritisasi migrasi merupakan konstruksi isu migrasi sebagai sebuah isu keamanan yang merujuk pada keamanan sosial-ekonomi, keamanan, tradisional negara, ataupun identitas negara. Menurut Ceyhan dan Tsoukala, Sekuritisasi migrasi dapat ditemukan dalam persepsi mengenai kehadiran warga asing mengancam masyarakat baik itu dari segi sosial-ekonomi (lapangan pekerjaan, kebijakan sosial, masalah lingkungan perkotaan, sumber daya), segi keamanan (batas negara, keamanan internal dan eksternal, kedaulatan), segi identitas (demografi dan bahaya identitas) dan segi politik (anti-imigran, rasisme, xenophobia).<sup>17</sup> Sekuritisasi migrasi maupun ancaman keamanan dari imigran bukanlah hal yang alamiah, hal itu dikonstruksi dengan argument-argumen retorik yang diproduksi oleh politisi, badan-badan keamanan dan media melalui teks, penggunaan bahasa dalam kebijakan, dalam produk hukum maupun dalam pernyataan publik.

Guild menjelaskan sekuritisasi migrasi pasca serangan 11 September 2001 mengkonstruksi neksus

---

<sup>17</sup> Ceyhan, Ayse & Tsoukala, Anastasia (2002). *Security Immigration: Toward a critique of the governmentally of unease*. hlm. 63-92.

antara terorisme dengan migrasi paksa dan kebijakan suaka. Amerika Serikat tercipta pandangan adanya keterkatian langsung antara warga asing, khususnya dari negara Islam,<sup>18</sup> dengan ancaman terorisme yang kemudian menjadi pusat dalam pembuatan kebijakan keamanan di negara-negara Barat. Sekuritisasi diwujudkan sebagai kebijakan yang terhubung langsung dengan kebijakan melawan terorisme seperti *War on Terrorism* yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Setelah itu peristiwa Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat diberlakukan Undang-undang yang memberikan kekuasaan pada Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk mendetensi, mendeportasi warga asing atau mengeksklusi warga asing yang diduga terlibat dalam aksi terorisme.

Pengungsi dan pencari suaka yang berada di Eropa telah lama dianggap sebagai ancaman negara dimana sebagian besar berasal dari negara mayoritas Muslim yang memiliki identitas yang kontras dengan identitas Eropa. Setelah Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, kebijakan yang memperkuat kontrol perbatasan dilihat sebagai salah satu bagian krusial kebijakan anti-terorisme Eropa. Pada tahun 2001, Inggris mengadakan Undang-undang Anti-Terrorisme, Kriminal dan Keamanan yang disahkan. Dengan adanya Undang-undang tersebut, *Home Secretary* memiliki wewenang untuk mendetensi dan mengeksklusi terduga teroris dari proses determinasi pengungsi (refugees determination/ RSD). Sementara itu, di Jerman perang melawan terorisme dilakukan

---

<sup>18</sup> Guild, E. 2005. *Immigration, Asylum, Borders and Terrorism: The Unexpected Victims*, dalam Gokay, B. & Walker, R. B. J. *11 September 2001: War, Terror and Judgement*. (London: Frank Cass Publisher).

dengan melacak asal-usul dan keberadaan orang dan di Belanda sidik jari pencari suaka digunakan pada proses aplikasi suaka untuk memeriksa catatan kriminal.

Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Donald Trump mengeluarkan kebijakan pelarangan migrasi dari negara-negara Islam. Kebijakan tersebut dimunculkan atau ditegaskan kembali bahwa terorisme lekat dengan masyarakat Muslim, sehingga perlu diatur dengan tegas masuknya masyarakat Muslim ke Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi masalah lebih lanjut karena tingginya jumlah pengungsi dunia dari negara-negara Islam yang diakibatkan oleh konflik di dalam atau melibatkan negaranya. Hal serupa juga muncul di wilayah Eropa saat gelombang pengungsi Suriah meningkat. Herta menjelaskan sekuritisasi atas pengungsi Suriah terjadi di Ameika Serikat dan Eropa dengan merujuk kepada pernyataan publik yang dibuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Dalam sebuah konferensi pers, Donald Trump menyatakan bahwa pengungsi lintas-batas perlu dipertanyakan mengenai pandangannya atas pembunuhan untuk kehormatan, dan Islam radikal. Sementara Orban mengatakan bahwa menerima pengungsi lintas-batas seperti “mengimpor kriminal, terorisme dan homofobia”.

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa yang dapat dirumuskan dari dasar pemikiran yang telah diterapkan, yaitu:

1. Kebijakan Donald Trump membatasi Imigran Muslim sebagai alasan untuk menghindari terorisme Islam Radikal dan kriminal di AS.

2. Kebijakan imigrasi Trump membatasi imigran Muslim sebagai alasan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat AS.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulisan dalam penulisan ini adalah dengan metode kualitatif dengan data-data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, media cetak, dan media elektronik online atau offline yang memiliki relevansi dan mendukung untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan mengetahui Kebijakan Donald Trump membatasi Imigran Muslim sebagai alasan untuk menghindari terorisme Islam radikal dan kriminal di AS.
2. Untuk menganalisis Kebijakan Donald Trump membatasi imigran Muslim sebagai alasan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat AS.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian pada penulisan ini adalah sebagai usaha untuk menghindari diri dari penulisan yang berjangkauan luas maka diperlukan pembatasan masalah. Upaya pembatasan masalah ini dimaksud agar disamping pada penulis dapat tetap fokus perhatiannya, juga membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah menepatkan perhatian sejak terjadinya kebijakan imigran muslim di Amerika Serikat pada tahun 2015-2018 oleh Presiden Donald Trump yang terdapat penutupan imigran muslim di Amerika Serikat

hingga membuat keputusan kebijakan tersebut dengan membatasi imigran muslim di Amerika Serikat.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan yang akan ditampilkan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### 2. **BAB II Sejarah dan Pertumbuhan Imigran Muslim di Amerika Serikat**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang sejarah imigran Muslim di Amerika Serikat, pertumbuhan imigran Muslim di Amerika Serikat.

### 3. **BAB III Dinamika Kebijakan di Amerika Serikat pada era Barack Obama**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang perkembangan Kebijakan dalam memerangi terorisme “*War on Terrorism*” atau WOT, dan Kebijakan imigrasi Amerika Serikat “*Deferred Action for Childhood Arrivals*” atau DACA.

### 4. **BAB IV Proses Kebijakan Donald Trump terhadap imigran Muslim di Amerika Serikat**

Dalam bab ini akan menganalisis dan menjabarkan tentang upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump dalam menangani Imigran Muslim di Amerika Serikat pada tahun 2015-2018 sebagai keterlibatan dari teori yang digunakan dalam penelitian ini dan Kebijakan-kebijakan Migrasi di Amerika Serikat yang pernah diputuskan Donald Trump, Politik Luar Negeri dan Isu Imigran Muslim di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald

Trump, alasan Donald Trump melarang imigran Muslim masuk ke AS.

## 5. **BAB V Kesimpulan**

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada penulisan skripsi.